



**A-N-T-I**

**ALIANSA NASIONÁL TIMOR-LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONÁL**

Telephone: 77179655/77289241/77402231

e-mail: [lanarra.del@gmail.com](mailto:lanarra.del@gmail.com) or [maubere\\_oan@yahoo.com](mailto:maubere_oan@yahoo.com) or [moniz@jsmp.minihub.org](mailto:moniz@jsmp.minihub.org)

## **Pernyataan Bersama**

### **Hari Internasional Hak Korban untuk Kebenaran dan Keadilan: ANTI menuntut Negara Timor – Leste untuk tidak mengabaikan hak-hak korban**

Pada tanggal 24 Maret sebagai hari internasional mengenai hak korban atas kebenaran dan keadilan. Penentuan hari ini sebagai hari korban pelanggaran hak asasi manusia diputuskan melalui sebuah Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. A/HRC/Res/14/7 pada tahun 2010 yang lalu.

Alasan dan pertimbangan Dewan Hak Asasi Manusia memutuskan hari ini sebagai hari bersejarah untuk memberikan penghargaan kepada Oscar Arnulfo Romero sebagai seorang Uskup dari El Salvador yang dengan dukungannya, keberaniannya dan hingga mengorbankan nyawanya dalam memperjuangkan dan membela hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan akhirnya ia harus menghebuskan nafasnya karena dibunuh. Oleh karena itu, PBB mempertimbangkan dan memilih hari ini sebagai hari internasional atas hak korban untuk kebenaran dan keadilan.

Timor-Leste sebagai anggota komunitas internasional yang baru atau anggota PBB yang ke 191, juga sebagai “pemilik” dari hari ini, terlebih karena Timor Leste sebagai “Negara korban” pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama 24 tahun masa pendudukan ilegal oleh regim Soeharto – Indonesia. Oleh karena itu, Timor Leste juga berkewajiban moral untuk merayakan hari ini dan menyebarkan-luaskan semangatnya agar hak para korban atas kebenaran dan keadilan terus dikedepankan, dan juga sebagai pelajaran untuk dapat “mengajarkan” para generasi baru untuk tidak menjadikan orang lain korban pelanggaran hak asasi manusia.

Tuntutan atas hak korban pelanggaran hak asasi manusia untuk kebenaran dan keadilan bukan hanya memuaskan korban semata, namun juga untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kebenaran sebagai harta bersejarah sebuah Negara untuk tidak mengulangi apa yang telah terjadi di masa lampau. Sejarah bukan hanya mengenai perihal kepahlawanan dalam perjuangan yang dipenuhi dengan tindakan kekerasan, namun juga harus diterjemahkan secara meluas yang mencakup kesengsaraan para korban, agar kita dapat memahami bagaimana kesengsaraan orang agar tidak membuat orang sengsara lagi.

*“Kebenaran harus diungkap, dipelajari dan diteruskan kepada generasi sekarang dan generasi di masa mendatang. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut untuk*

*menemukan kebenaran dan mengakui masa lalu kita yang “gelap” dan mencoba untuk “menutupinya” dengan kepalawanan masa lalu saja. Kita harus jujur untuk menerima masa lalu kita agar kita dapat belajar untuk menjauhkan diri dari perilaku “arogansi”;*kata wakil President Asosiasi Korban Timor Leste, Ibu Maria da Gloria.

Begitupun hak atas keadilan tidak hanya untuk kepetingan korban pelanggaran hak asasi manusia semata. Keadilan adalah kebutuhan manusia kapan pun. Sekarang kita semua “haus akan keadilan” dan juga generasi mendatang masih memerlukan hak tersebut.

Jika kita tidak memiliki keberanian untuk memberikan keadilan bagi keadilan masa lalu, maka tidak mungkin bagi Negara kita untuk dapat melakukan kewajibannya untuk memberikan keadilan bagi kasus-kasus sekarang dan di masa mendatang, seperti (korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam rumah tangga, ..dll).

*“Prinsip keadilan tersebut harus dipegang kuat dan tidak boleh “diotak-atik” sesuai dengan kemauan para “elit” atau terutama kekuasaan para pelaku. Masalah tidak ada kemampuan untuk mewujudkan keadilan, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip tersebut. Kemampuan untuk mewujudkan adalah relatif dan menjadi kewajiban semua masyarakat internasional”;* kata Sisto dos Santos Koordinator ANTI.

Perayaan hari ini untuk mengenang kembali dan membangunkan kesadaran semua pemimpin Negara mengenai pentingnya kewajiban Negara anggota (termasuk Timor-Leste dan Indonesia ) untuk mengambil tindakan agar dapat memberikan hak-hak kebenaran dan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional (ANTI) bersama dengan para korban dan keluarga korban menuntut kepada :

1. Parlemen Nasional untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk membuat kebijakan dan undang-undang agar Negara Timor-Leste dapat mewujudkan kewajibannya terhadap para korban yang juga merupakan hak warga Negara terhadap kebenaran dan keadilan;
2. Parlemen Nasional untuk mengagendakan kembali proses perancangan terhadap rancangan undang-undang Program Reparasi dan Institusi Memori yang merupakan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban Negara untuk memberikan penghargaan bagi penderitaan korban yang belum mendapatkan solusi. Pada periode legislatif kedua,, persoalan veteran menjadi agenda prioritas dan mendapatkan solusi, oleh karena itu kami yakin bahwa pada legislatif sekarang akan memberikan prioritas bagi persoalan korban;
3. Meminta kepada Negara Timor-Leste untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Internasional bagi Penghilangan Paksa agar dapat

memfasilitasi repatriasi orang Timor Leste yang dibawah Indonesia selama pendudukan Indonesia.

4. Meminta kepada Pemerintah Timor – Leste untuk melihat dan mematuhi Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Timor Leste dan Indonesia mengenai rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan, terlebih mendirikan Komisi untuk Orang Hilang agar dapat mencari orang Timor Leste yang hilang secara paksa selama masa pendudukan Indonesia.
5. Meminta kepada masyarakat internasional, terlebih Dewan Keamanan PBB untuk tidak melepaskan tanggungjawab terhadap proses kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Leste pada masa lampau agar dapat memutuskan rantai impunitas di Timor Leste dan Negara lain.
6. Meminta dukungan solidaritas organisasi internasional seperti Amnesty Internasional, ETAN, Forum Asia, AFAD, ICTJ, TAPOL, ICG untuk terus berjuang dan melakukan advokasi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste dimana PBB gagal secara total untuk menyelesaikannya.

Dili, 22 Maret 2013

**Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional (ANTI)**

1. Komite 12 de Novembru
2. Asosiasaun Vítima Timor Leste
3. Asosiasaun HAK
4. Judicial System Monitoring Program (JSMP)
5. ACbit (Asosiasaun *Chega* ba Ita)
6. Sekretariadu FONGTIL
7. Asia Justice And Rights (AJAR) Timor Leste
8. Front Mahasiswa Timor-Leste (FMTL)
9. MDI (Mata Dalam Institut)
10. Haberan Institut
11. KSI (Kadalak Solimutu Institut)
12. Ita Ba Paz
13. Fokupers
14. CDI
15. KBH (Knua Buka Hatene)